



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS BUDI RAHARJA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **166612**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.650.750.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.087 m²/300 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 1.300.000.000
2. Tanah Seluas 1.325 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 110.750.000
3. Tanah Seluas 120 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 120 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 534.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, SUZUKI PICK UP Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 228.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	93.134.480
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.992.700.000
Sub Total	Rp.	4.499.084.480
III. HUTANG	Rp.	439.370.512
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.059.713.968

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.